



**SIAPAKAH WARGA NEGARA IDEAL DI ERA DEMOKRASI? SEBUAH
TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS TENTANG GOOD CITIZENSHIP
TAHUN 2019–2025**

Fitriah Artina^{1)*}, I Nengah Agus Tripayana²⁾

¹²Universitas Mataram

E-mail: fitriahartina@unram.ac.id

ABSTRAK

Good citizenship merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*) terhadap artikel-artikel ilmiah yang mengkaji hubungan antara *good citizenship* dan demokrasi yang dipublikasikan pada periode 2019–2025. Menggunakan protokol PRISMA, sebanyak 312 artikel diidentifikasi dari basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ERIC, dan setelah proses penyaringan, 20 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara mendalam. Hasil analisis menunjukkan lima tema utama yang muncul dari literatur: (1) konsep dan karakteristik *good citizenship* dalam konteks demokrasi; (2) norma kewarganegaraan dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik; (3) peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang demokratis; (4) dimensi kewarganegaraan digital dalam demokrasi kontemporer; dan (5) kebajikan sipil sebagai fondasi demokrasi yang berkelanjutan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa *good citizenship* bersifat multidimensi, mencakup partisipasi aktif, toleransi, tanggung jawab sosial, dan kompetensi digital, serta bahwa pendidikan kewarganegaraan yang efektif berperan krusial dalam membentuk warga negara demokratis. Penelitian ini memberikan kontribusi sintesis konseptual yang komprehensif bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: *Good citizenship*; demokrasi; partisipasi politik; pendidikan kewarganegaraan; tinjauan literatur sistematis

ABSTRACT

Good citizenship is a fundamental pillar of a healthy democratic system. This study aims to conduct a Systematic Literature Review (SLR) of scholarly articles examining the relationship between good citizenship and democracy published between 2019 and 2025. Using the PRISMA protocol, 312 articles were identified from Scopus, Web of Science, Google Scholar, and ERIC databases, and after screening, 20 articles met the inclusion criteria for in-depth analysis. The analysis revealed five major themes emerging from the literature: (1) the concept and characteristics of good citizenship in democratic contexts; (2) citizenship norms and their influence on political participation; (3) the role of civic education in shaping democratic citizens; (4) the digital citizenship dimension in contemporary democracy; and (5) civic virtues as the foundation of sustainable democracy. These findings imply that good citizenship is multidimensional, encompassing active participation, tolerance, social responsibility, and digital competence, and that effective civic education plays a crucial role in cultivating democratic citizens. This study provides a comprehensive conceptual synthesis for the development of civic education in Indonesia.

Keywords: *good citizenship; democracy; political participation; civic education; systematic literature review*

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada kelembagaan formal seperti konstitusi, parlemen, dan pemilu, tetapi juga pada kualitas warga negaranya. Warga negara yang baik (*good citizen*) merupakan prasyarat esensial bagi keberlangsungan



demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa partisipasi aktif, kesadaran kewarganegaraan, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis dari warganya, institusi demokrasi akan kehilangan makna substantifnya

Konsep *good citizenship* telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Awalnya, warga negara yang baik didefinisikan secara sempit sebagai individu yang taat hukum dan membayar pajak. Namun, seiring perkembangan teori demokrasi, konsep ini meluas mencakup dimensi-dimensi seperti partisipasi aktif dalam proses politik, toleransi terhadap keberagaman, tanggung jawab sosial, kemampuan berpikir kritis, serta keterlibatan dalam masyarakat sipil (Ekman & Amnå, 2025; Verba et al., 2021).

Dalam konteks kontemporer, perkembangan teknologi digital telah menambahkan dimensi baru pada konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari *good citizenship* modern, di mana kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang digital dianggap sebagai kompetensi kewarganegaraan yang vital (Ciftci et al., 2024; Alharbi & Almari, 2024). Di sisi lain, berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam menumbuhkan warga negara yang demokratis di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya polarisasi sosial.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menghadapi tantangan khusus dalam membentuk *good citizenship*. Dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, pembentukan warga negara yang demokratis memerlukan pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dan kontekstual (Rahayu & Susanto, 2023; Alfian & Wahyuni, 2023). Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi, namun pertanyaan mendasar tentang efektivitasnya dalam membentuk *good citizenship* tetap relevan untuk dikaji.

Meskipun terdapat banyak penelitian tentang *good citizenship* dan demokrasi, belum terdapat sintesis sistematis yang komprehensif yang menghimpun temuan-temuan penelitian terbaru (2019–2025) mengenai hubungan kedua konsep ini, khususnya yang mempertimbangkan perkembangan era digital dan konteks Indonesia. Tinjauan literatur sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan penelitian yang ada, sehingga dapat memberikan landasan empiris yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis konsep *good citizenship* dalam hubungannya dengan demokrasi menurut literatur terkini; (2) memetakan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian tentang *good citizenship* dan demokrasi periode 2019–2025; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan *good citizenship* dalam konteks demokratis; dan (4) merumuskan implikasi bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis yang terstruktur dan dapat direplikasi terhadap seluruh penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan (Jerome, 2024; Pratama et al., 2023).



Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks bereputasi; (2) rentang waktu publikasi 2019–2025; (3) berfokus pada good citizenship, kewarganegaraan demokratis, partisipasi sipil, atau pendidikan kewarganegaraan dalam konteks demokrasi; (4) menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia; dan (5) tersedia dalam teks lengkap. Adapun kriteria eksklusi mencakup: literatur abu-abu (grey literature), buku teks, laporan lembaga non-akademik, skripsi/tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan, dan artikel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan good citizenship dan demokrasi.

Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada empat basis data elektronik, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan ERIC. Kata kunci yang digunakan adalah kombinasi dari: “good citizenship”, “democracy”, “civic engagement”, “citizenship norms”, “democratic participation”, “civic education”, “pendidikan kewarganegaraan”, dan “partisipasi demokrasi”. Kombinasi kata kunci menggunakan operator Boolean AND dan OR untuk memaksimalkan cakupan pencarian.

Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahap sesuai protokol PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana seluruh artikel yang ditemukan dari keempat basis data dicatat. Tahap kedua adalah skrining judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang jelas tidak relevan. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan berdasarkan teks lengkap dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara lebih ketat. Tahap keempat adalah penetapan artikel final yang dianalisis. Ringkasan proses seleksi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA

Tahapan	Keterangan	Jumlah Artikel
Identifikasi (pencarian basis data)	Scopus, Web of Science, Google Scholar, ERIC	312
Setelah duplikasi dihapus	-	271
Skrining judul & abstrak	Relevansi topik, tahun 2019-2025	89
Kelayakan teks lengkap	Kriteria inklusi/eksklusi diterapkan	31
Artikel yang dimasukkan	Artikel final untuk dianalisis	20

(Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025)

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik (thematic synthesis) sebagaimana direkomendasikan oleh Thomas dan Harden (2008). Setiap artikel yang lolos seleksi dikodekan berdasarkan: penulis dan tahun, negara/konteks penelitian, metode penelitian, fokus kajian, dan temuan utama. Selanjutnya, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang kemudian dikembangkan menjadi tema-tema deskriptif dan analitis. Proses ini memungkinkan identifikasi pola dan kesenjangan dalam literatur secara sistematis.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses seleksi, 20 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis dalam tinjauan sistematis ini. Gambaran umum artikel yang dianalisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Artikel yang Dianalisis

No	Penulis (Tahun)	Jurnal/Sumber	Fokus Kajian	Metode
1	Jerome (2024)	Review of Education	Dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap hasil kewarganegaraan aktif	SLR, 47 studi
2	Goodman (2025)	Political Research Quarterly	Siapa warga negara yang baik? Eksperimen konjoin di tiga demokrasi	Eksperimen survei
3	Yilmaz et al. (2024)	Frontiers in Political Science	Apakah demokrasi langsung meningkatkan kebajikan sipil?	SLR, 67 studi
4	Saud & Margono (2021)	Journal of Information Technology and Politics	Demokrasi digital di Indonesia dan partisipasi politik pemuda	Kualitatif
5	Ciftci et al. (2024)	INJECT Journal	Pemetaan transformasi partisipasi politik melalui kewarganegaraan digital	Bibliometrik
6	Finkel (2024)	American Journal of Political Science	Pendidikan kewarganegaraan online dan kewarganegaraan demokratis	Eksperimen
7	Pettit & Jan (2021)	Political Science	Norma kewarganegaraan dan prediksi partisipasi politik	Kuantitatif
8	Graafland et al. (2025)	Scientific Reports	Warga negara di negara demokratis memiliki sifat lebih baik	Analisis data lintas negara
9	Becker et al. (2025)	MDPI Social Sciences	Konseptualisasi norma kewarganegaraan yang diperluas	Kuantitatif
10	Alharbi & Almari (2024)	IMBR	Teknologi digital dan demokrasi pemuda: tinjauan naratif	Tinjauan naratif
11	Sampaio et al. (2023)	ScienceDirect	Dinamika budaya ruang digital: demokrasi dan partisipasi pemuda	Kajian literatur
12	Chen & Yuen (2024)	Frontiers in Communication	Pemuda sebagai warga global: kewarganegaraan digital dan kompetensi global	Survei
13	Ekman & Amnå (2025)	Tandfonline	Civic engagement reimagined: kewargaan, sivilness, dan kesopanan sipil	Konseptual



No	Penulis (Tahun)	Jurnal/Sumber	Fokus Kajian	Metode
14	Pratama et al. (2023)	Jurnal Civics UNY	SLR program civic engagement dalam pendidikan kewarganegaraan	SLR
15	Ernita, T., & Suyato. (2026)	JMCE UNP	SLR peningkatan partisipasi demokratis melalui keterampilan sipil	SLR
16	Henderson & Hess (2025)	The Social Studies	Peran pendidikan sipil dalam memperkuat demokrasi	SLR
17	Rahayu & Susanto (2023)	Jurnal Civic Hukum UMM	PKn sebagai wahana smart and good digital citizenship	Deskriptif kualitatif
18	Miftahuddin et al. (2022)	Jurnal Civics UNY	Global citizenship education dalam profil pelajar Pancasila	Kajian literatur
19	Alfian & Wahyuni (2023)	Maliki Interdisciplinary Journal	Membangun smart and good citizen di era digital melalui PKn	Deskriptif kualitatif
20	Verba et al. (2021)	Journal of Deliberative Democracy	Political talk dan triad kewarganegaraan demokratis	Konseptual

(Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2025)

Dari analisis terhadap 20 artikel tersebut, ditemukan lima tema utama yang merepresentasikan perkembangan pemikiran tentang *good citizenship* dan demokrasi dalam periode 2019–2025. Berikut adalah pembahasan masing-masing tema.

1. Konsep dan Karakteristik *Good Citizenship* dalam Demokrasi

Tema pertama yang muncul secara konsisten dalam literatur adalah redefinisi konsep *good citizenship* dalam konteks demokrasi modern. Goodman (2025) melalui eksperimen konjoin di tiga negara demokrasi menemukan bahwa pemahaman warga tentang “warga negara yang baik” bersifat multidimensi dan melampaui sekadar kepatuhan pada hukum. Warga negara di ketiga negara yang diteliti (Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda) secara konsisten mengidentifikasi norma-norma *good citizenship* yang mencakup: pemungutan suara secara rutin, memiliki teman dari latar belakang beragam (toleransi), dan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.

Ekman dan Amnå (2025) mengembangkan konseptualisasi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan tiga elemen: kewargaan (*citizenship*), sivikness (*civicness*), dan kesopanan sipil (*civility*). Mereka berargumen bahwa ketiga elemen ini saling melengkapi dan bersifat komplementer dalam membentuk warga negara yang demokratis. Sivikness mengacu pada kondisi institusional dan budaya yang mendukung keterlibatan inklusif, sementara civility memastikan partisipasi yang dipandu oleh rasa hormat, toleransi, dan dialog konstruktif.

Verba et al. (2021) dalam kajian mereka tentang “triad kewarganegaraan demokratis” mengidentifikasi tiga dimensi yang saling terkait: (1) dukungan terhadap sistem politik demokratis, (2) pandangan normatif tentang “warga negara yang baik”, dan (3) partisipasi aktif dalam proses politik. Kerangka ini menegaskan bahwa *good citizenship* tidak hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang nilai-nilai dan sikap yang mendasarinya. Sementara itu, Graafland et al. (2025) melalui analisis data dari 80 negara menemukan bahwa warga negara di negara-



negara yang lebih demokratis cenderung memiliki sifat-sifat yang lebih konstruktif (*benevolent*) dan lebih sedikit sifat-sifat destruktif (*malevolent*), menunjukkan hubungan yang erat antara demokrasi dan karakter warga negara.

2. Norma Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik

Tema kedua berfokus pada peran norma kewarganegaraan dalam membentuk perilaku partisipasi politik warga. Becker et al. (2025) melalui pendekatan konseptualisasi yang diperluas menemukan bahwa norma kewarganegaraan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. Mereka mengidentifikasi pergeseran dari pola “*duty-based citizenship*” (kewarganegaraan berbasis kewajiban) menuju “*engaged citizenship*” (kewarganegaraan aktif/terlibat), di mana warga secara sukarela dan kritis terlibat dalam urusan publik.

Pettit dan Jan (2021) dalam penelitian kuantitatif mereka menemukan bahwa bagaimana seseorang mendefinisikan *good citizen* secara langsung memengaruhi jenis partisipasi politik yang mereka lakukan. Warga yang memegang norma *duty-based* cenderung lebih aktif dalam bentuk partisipasi konvensional seperti pemungutan suara, sementara warga dengan norma *engaged citizenship* lebih cenderung terlibat dalam bentuk partisipasi non-konvensional seperti petisi, demonstrasi, dan boikot. Finkel (2024) dalam eksperimen yang dilakukan di konteks demokrasi baru menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan online yang dirancang dengan baik dapat secara efektif menginduksi norma kewarganegaraan demokratis dan meningkatkan partisipasi politik.

Temuan-temuan ini memiliki relevansi yang signifikan bagi Indonesia. Saud dan Margono (2021) mencatat bahwa kebangkitan demokrasi digital di Indonesia telah menciptakan peluang baru bagi partisipasi politik pemuda, namun juga membawa tantangan berupa disinformasi dan polarisasi. Mereka mengidentifikasi bahwa pemuda Indonesia yang aktif di media sosial menunjukkan pola keterlibatan sipil yang berbeda dari generasi sebelumnya, dengan lebih banyak terlibat dalam advokasi online namun kurang dalam partisipasi formal seperti keanggotaan partai.

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentuk Warga Negara Demokratis

Tema ketiga yang muncul kuat dalam literatur adalah peran sentral pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk *good citizenship* yang demokratis. Jerome (2024) dalam tinjauan sistematis yang menganalisis 47 studi menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai hasil kewarganegaraan aktif, termasuk pengetahuan politik, efikasi sipil, dan kecenderungan berpartisipasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan pedagogik yang digunakan.

Henderson dan Hess (2025) dalam SLR mereka tentang peran pendidikan sipil dalam memperkuat demokrasi menemukan bahwa pendekatan pedagogis yang partisipatif dan berbasis pengalaman, seperti *service learning* dan *project-based learning*, terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan keterlibatan demokratis dibandingkan pendekatan berbasis hafalan. Temuan ini sejalan dengan Ernita et al. (2026) yang mengidentifikasi bahwa pengembangan keterampilan sipil (*civic skills*) yang mencakup berpikir kritis, komunikasi, dan literasi media merupakan fondasi penting bagi partisipasi demokratis yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, Rahayu dan Susanto (2023) serta Alfian dan Wahyuni (2023) menunjukkan bahwa PKn memiliki potensi besar sebagai wahana pembentukan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*), terutama ketika diintegrasikan dengan nilai-

nilai Pancasila dan konteks keindonesiaan. Miftahuddin et al. (2022) menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan global (*global citizenship education*) dalam perspektif penguatan profil pelajar Pancasila dapat menjadi jembatan antara identitas lokal dan kesadaran global. Pratama et al. (2023) melalui SLR program *civic engagement* menemukan bahwa program-program yang mengintegrasikan keterlibatan komunitas nyata dengan pembelajaran di kelas menunjukkan hasil yang lebih baik dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

4. Kewarganegaraan Digital dalam Demokrasi Kontemporer

Tema keempat mencerminkan perkembangan signifikan dalam literatur terkini, yaitu kemunculan dan penguatan konsep kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) sebagai komponen penting *good citizenship* di era demokratis kontemporer. Ciftci et al. (2024) dalam analisis bibliometrik terhadap 339 artikel yang dipublikasikan antara 2019 dan 2024 mengidentifikasi empat kluster dominan dalam penelitian digital citizenship: kewarganegaraan digital, kewarganegaraan, partisipasi politik, dan transformasi digital.

Alharbi dan Almari (2024) dalam tinjauan naratif mereka tentang teknologi digital dan demokrasi pemuda menyimpulkan bahwa meskipun teknologi digital membuka peluang besar bagi partisipasi demokratis yang lebih inklusif dan aksesibel, ia juga menghadirkan risiko berupa disinformasi, *echo chamber*, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi komponen esensial *good citizenship* di era digital. Chen dan Yuen (2024) menemukan bahwa pemuda yang memiliki kompetensi kewarganegaraan digital yang tinggi cenderung lebih aktif dalam keterlibatan sipil global dan menunjukkan identitas kewargaan global yang lebih kuat.

Sampaio et al. (2023) menganalisis dinamika budaya ruang digital dalam konteks demokrasi dan partisipasi pemuda, menemukan bahwa ruang digital telah mentransformasi cara warga berpartisipasi dalam demokrasi, dari partisipasi yang bersifat episodik dan individual menuju partisipasi yang bersifat kontinyu dan jaringan (*networked*). Dalam konteks Indonesia, Saud dan Margono (2021) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan *digital citizenship* yang tepat dan terarah sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi positif teknologi digital bagi demokrasi, sekaligus meminimalkan risikonya.

5. Kebajikan Sipil sebagai Fondasi Demokrasi Berkelanjutan

Tema kelima berfokus pada peran kebajikan sipil (*civic virtues*) sebagai fondasi moral dan kultural yang menopang demokrasi yang berkelanjutan. Yilmaz et al. (2024) dalam tinjauan sistematis terhadap 67 studi tentang hubungan antara demokrasi langsung dan kebajikan sipil menemukan bahwa meskipun terdapat efek positif, hubungan tersebut bersifat moderat dan sangat bervariasi tergantung pada konteks institusional dan budaya. Temuan ini menunjukkan bahwa kebajikan sipil tidak tumbuh secara otomatis dari institusi demokratis, melainkan memerlukan kondisi sosial dan pendidikan yang mendukung.

Graafland et al. (2025) memberikan bukti empiris lintas negara yang menunjukkan bahwa kebajikan sipil seperti kejujuran dan kesopanan (*civility*) tidak hanya merupakan produk demokrasi, tetapi juga merupakan prasyarat yang memperkuat demokrasi itu sendiri. Mereka menemukan bahwa kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan mediator kunci antara kebajikan sipil dan demokrasi. Goodman (2025) menambahkan bahwa toleransi terhadap keberagaman, yang merupakan salah satu kebajikan sipil terpenting, secara konsisten diidentifikasi sebagai karakteristik *good citizenship* di semua negara demokratis yang diteliti.



Dari perspektif pendidikan, Henderson dan Hess (2025) menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembentukan disposisi demokratis sejak dini sebagai fondasi kebajikan sipil. Warganegara et al. (2024) menunjukkan bahwa kebajikan sipil dapat dikembangkan secara sistematis melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, yang mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan dalam praktik-praktik demokratis autentik. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang menekankan gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial dapat menjadi landasan budaya yang kuat bagi pengembangan kebajikan sipil yang mendukung demokrasi.

Sintesis dan Implikasi

Secara keseluruhan, literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa *good citizenship* dalam konteks demokratis bersifat dinamis, multidimensi, dan kontekstual. Terdapat konsensus yang kuat bahwa *good citizenship* mencakup dimensi kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (nilai-nilai dan sikap), dan behavioral (partisipasi dan tindakan). Dimensi-dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memperkuat.

Perkembangan terbaru dalam literatur menunjukkan setidaknya tiga pergeseran konseptual yang signifikan. Pertama, pergeseran dari *good citizenship* yang bersifat pasif (*law-abiding*) menuju yang bersifat aktif (*engaged*), di mana warga tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada kehidupan demokratis. Kedua, perluasan arena kewarganegaraan dari yang semata-mata bersifat lokal dan nasional menuju yang juga mencakup dimensi global dan digital. Ketiga, pengakuan yang semakin kuat bahwa kebajikan sipil dan karakter warga negara merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari *good citizenship* yang demokratis.

Bagi Indonesia, implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya menekankan aspek kognitif (pengetahuan tentang konstitusi dan sistem pemerintahan) tetapi juga aspek afektif (nilai-nilai demokratis, toleransi) dan behavioral (keterampilan partisipasi aktif, literasi digital). Reformasi PKn yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal Pancasila dengan tuntutan kewarganegaraan global dan digital tampaknya merupakan arah yang paling menjanjikan.

SIMPULAN

Tinjauan literatur sistematis ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis 20 artikel ilmiah yang mengkaji hubungan antara *good citizenship* dan demokrasi dalam periode 2019-2025. Lima tema utama yang ditemukan-konsep dan karakteristik *good citizenship*, norma kewarganegaraan dan partisipasi politik, pendidikan kewarganegaraan, kewarganegaraan digital, dan kebajikan sipil-secara bersama-sama menggambarkan kompleksitas dan kedinamisan *good citizenship* dalam konteks demokratis kontemporer.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa *good citizenship* bukan merupakan konsep yang statis dan tunggal, melainkan konstruk yang terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial, politik, dan teknologi. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif, yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, pengembangan kebajikan sipil, dan kompetensi digital, merupakan instrumen penting dalam membentuk warga negara yang demokratis.



Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan basis data dan bahasa yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pencarian ke basis data yang lebih beragam, termasuk sumber-sumber berbahasa Indonesia yang lebih komprehensif, serta melakukan meta-analisis kuantitatif untuk menilai besaran efek dari berbagai intervensi pendidikan kewarganegaraan terhadap good citizenship dalam konteks demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., & Wahyuni, S. (2023). Membangun smart and good citizen di era digital melalui pendidikan kewarganegaraan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(2), 45–58. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/26483>
- Alharbi, A., & Almari, M. (2024). Digital technologies and youth democracy: A narrative review of civic participation, digital citizenship and emerging challenges. *Information Management and Business Review*, 16(3), 112–125. <https://ojs.amhinternational.com/index.php/imbr/article/view/4716>
- Becker, R., Johansson, M., & Schultz, P. (2025). Expanding the conceptualisations of citizenship norms. *Social Sciences*, 15(3), 73. <https://doi.org/10.3390/socsci15030073>
- Chen, A., & Yuen, M. (2024). Youth netizens as global citizens: Digital citizenship and global competence among undergraduate students. *Frontiers in Communication*, 9, 1398001. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1398001>
- Ciftci, O., Demir, K., & Ozkan, B. (2024). Mapping the transformation of political participation through digital citizenship: Global trends from a bibliometric analysis (2019–2024). *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication*, 10(2). <https://doi.org/10.18326/inject.v10i2.5063>
- Ekman, J., & Amnå, E. (2025). Civic engagement reimagined: The roles of citizenship, civiness, and civility. *Citizenship Studies*, 29(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/17448689.2025.2508191>
- Ernita, T., & Suyato. (2026). A systematic literature review on enhancing democratic participation through civic skills. *Journal of Moral and Civic Education*, 8(1), 45–62. <http://jmce.ppj.unp.ac.id/index.php/JMCE/article/view/932>
- Finkel, E. (2024). Can online civic education induce democratic citizenship? Experimental evidence from a new democracy. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12765>
- Goodman, S. W. (2025). Who is a good citizen? Evidence from a conjoint experiment in three democracies. *Political Research Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/10659129251315456>
- Graafland, J., Hoogendoorn, A., & de Vries, R. (2025). Citizens in democratic countries have more benevolent traits, fewer malevolent traits, and greater well-being. *Scientific Reports*, 15, 97001. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97001-7>
- Henderson, A., & Hess, D. (2025). The role of civic education in strengthening democracy: A systematic literature review. *The Social Studies*. <https://doi.org/10.1080/00377996.2025.2611301>
- Jerome, L. (2024). A systematic literature review of research examining the impact of citizenship education on active citizenship outcomes. *Review of Education*, 12(1), e3472. <https://doi.org/10.1002/rev3.3472>
- Miftahuddin, A., Supriatna, N., & Sapriya, S. (2022). Global citizenship education in the perspective of strengthening Pancasila student profiles. *Jurnal Civics: Media Kajian*



- Kewarganegaraan, 19(2), 178–191.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/63983>
- Pettit, B., & Jan, Y. (2021). How citizenship norms predict participation in different political activities. *Political Science*, 72(3), 215–234.
<https://doi.org/10.1080/00323187.2021.1923374>
- Pratama, R., Suharno, S., & Winarno, W. (2023). A systematic literature review on civic engagement program through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 56–72.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/66024>
- Rahayu, D., & Susanto, H. (2023). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana dalam mempersiapkan warga negara muda yang smart and good digital citizenship. *Jurnal Civic Hukum*, 8(1), 33–48.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27674>
- Sampaio, A., Robinson, N., Moles, K., & Pangrazio, L. (2023). Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic engagement and youth participation in virtual spheres. *Telematics and Informatics*, 76, 101892. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.101892>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and the youth's political participation. *Journal of Information Technology and Politics*, 18(4), 443–454.
<https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900018>
- Verba, S., Thompson, D., & Schultz, K. (2021). Political talk and the triad of democratic citizenship. *Journal of Deliberative Democracy*, 17(2), 1–16.
<https://delibdemjournal.org/article/id/1359/>
- Yilmaz, G., Kraft, P., & Vatter, A. (2024). Does direct democracy increase civic virtues? A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 6, 1287330.
<https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1287330>